

RPSEP-84

DEMOKRASI UBAH HALUAN, POTRET KEMUNDURAN BANGSA?

Khalifah Oktarina

Mahasiswa Program Bidikimisi – Ilmu Komunikasi UPBJJ-UT Semarang

Abstrak

Menyambut hadirnya seorang pemimpin, adalah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Keberhasilan menjadikan negara ini sebagai komunitas demokratis, sudah terbukti. Prestasi inilah yang diakui oleh dunia internasional. Sebagai sebuah negara muda, Indonesia dinilai mampu mengendalikan masyarakatnya untuk melakukan pemilihan langsung kepala negaranya. Kajian komunikasi politik yang terangkum makalah ini, akan berusaha membongkar paradigma yang terlanjur berkembang di masyarakat, bahwa pemilihan kepala daerah atau kepala negara, memang sudah pantas dilakukan secara langsung. Apabila ada keinginan untuk kembali pada cara pemilihan terwakil, hal itu merupakan kemunduran. Dan bukan lagi prestasi yang diperoleh. Untuk mewujudkan sebuah negara demokratis, pemakalah menilai bahwa rangkaian pekerjaan besar sudah dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia. Secara mendasar, kajian komunikasi politik yang mengubah haluan pemilihan tak langsung merupakan wacana baru bagi Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan dampak luar biasa bagi Indonesia. Cakrawala dan kemampuan kebangsaan para negarawan semakin diuji dengan diluluskannya keinginan tersebut. Tonggak komunikasi politik yang harus dilalui oleh negara ini pun menjadi tak lagi tertata rapi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan – sebagai bentuk kontribusi pemakalah – yaitu dengan memberikan kesempatan atau model dari satu wilayah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tak langsung. Seluruh komponen bangsa harus menyaksikan proses serta hasil yang diperoleh. Andaikata yang terjadi adalah keruwetan yang tak terkendali, maka akan lebih bijak apabila pola lama ditinggalkan dan digantikan dengan cakrawala komunikasi politik baru yang terbukti sudah diakui dunia.

Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia merupakan sistem pemerintahan demokrasi, dalam sistem pemerintahan demokrasi suara rakyat sangat dibutuhkan karena rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam berlangsungnya sistem pemerintahan ini. Indonesia mendapatkan apresiasi yang baik atas penyelenggaraan demokrasi yang damai walaupun memiliki keanekaragaman dalam segala bidangnya. Kekhawatiran mengenai potensi konflik yang

tinggipun mulai terasa, yaitu saat pemilihan Presiden tahun ini dimana masyarakat tersegmentasi dalam dua kubu koalisi partai politik dimana rasa persatuan Indonesia mulai luntur karena mereka hanya mementingkan golongan saja, setelah gagap gembira pemilihan Presiden baru demokrasi Indonesia di guncang lagi permasalahan mengenai perubahan undang-undang pilkada langsung atau tidak langsung. Setelah melalui proses yang panjang akhirnya diputuskan bahwa pilkada dipilih oleh DPR, namun hal itu memperoleh kritikan dari rakyat karena menurut masyarakat pemilihan tidak langsung membatasi hak pilih rakyat dan menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Dalam makalah ini akan dibahas apakah benar pemilihan langsung merupakan kemunduran demokrasi? Adapun tujuan dari makalah ini yaitu memecahkan suatu hipotesis tersebut apakah benar atau tidak.

PEMBAHASAN

Pengertian demokrasi menurut para ahli : Menurut Harris Soche

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat atau diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah.

Menurut Henry B. Mayo

Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.

Menurut International Commission of Jurist

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.

Menurut C.F. Strong

Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

Menurut Samuel Huntington

Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Menurut Merriam, Webster Dictionary

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

Menurut Abdul Ghani Ar Rahhal

Di dalam bukunya, Al Islamiyyun wa Sarah Ad Dimuqrathiyyah mendefinisikan demokrasi sebagai “kekuasaan rakyat oleh rakyat”. Rakyat adalah sumber kekuasaan.

Menurut Hans Kelsen

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

Menurut John L Esposito

Pada dasarnya kekuasaan adalah dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Menurut Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang

penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Menurut Affan Gaffar
Demokrasi dimaknai dalam dua bentuk, yaitu :
Makna normatif (demokrasi normatif) adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara
Makna empirik (demokrasi empirik) adalah demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sebuah bentuk sistem pemerintahan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah.

Kelebihan dan Kekurangan Budaya Demokrasi

Kelebihan :

1. Demokrasi memberi kesempatan untuk perubahan di tubuh pemerintahan tanpa menggunakan kekerasan.
2. Adanya pemindahan kekuasaan yang dapat dilakukan melalui pemilihan umum.
3. Sistem demokrasi mencegah adanya monopoli kekuasaan.
4. Dalam budaya demokrasi, pemerintah yang terpilih melalui pemilu akan memiliki rasa berutang karena rakyat yang memilihnya, oleh karena itu hal ini akan menimbulkan pemicu untuk bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat.
5. Masyarakat diberi kebebasan untuk berpartisipasi yang menimbulkan rasa memiliki terhadap negara.

Kekurangan :

1. Masyarakat bisa salah dalam memilih dikarenakan isu-isu politik.
2. Fokus pemerintah akan berkurang ketika menjelang pemilu masa berikutnya.
3. Massa dapat memengaruhi orang.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Presiden dalam menjalankan kepemimpinannya harus memberikan

pertanggungjawaban kepada MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara hierachy rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan dengan cara pemilihan umum. Pada era Presiden Soekarno, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin tahun 1956. Indonesia juga pernah menggunakan demokrasi semu(demokrasi pancasila) pada era Presiden Soeharto hingga tahun 1998 ketika Era Soeharto digulingkan oleh gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang telah memakan banyak sekali harta dan nyawa dibayar dengan senyum gembira dan rasa syukur ketika Presiden Soeharto mengumumkan "berhenti sebagai Presiden Indonesua" pada 21 Mei 1998. Setelah era Seoharto berakhir Indonesia kembali menjadi negara yang benar-benar demokratis mulai saat itu. Pemilu demokratis yang diselenggarakan tahun 1999 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.Pada tahun 2004 untuk pertama kali Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden.Ini adalah sejarah baru dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Jenis-jenis Demokrasi dilihat dari penyaluran aspirasi rakyat :

- Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Bisa dikatakan demokrasi langsung adalah demokrasi yang bersih karena rakyat diberikan hak mutlak untuk memberikan aspirasinya.

- Demokrasi Tidak Langsung

Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan.

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung. Namun, setelah terpilihnya presiden baru tahun ini pemilihan kepala daerah mengalami polemik yaitu mengenai cara pemilihan yang digunakan dalam memilih kepala daerah melalui langsung atau tidak langsung. Hali ini juga mengalami pro dan kontra yang panjang setelah diluluskannya pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Adapun dampak negatif dan positif dari pelaksanaan pilkada langsung maupun tidak langsung.

Dampak Negatif Pilkada Langsung

- Dampak perseteruan sosial politik seperti demonstrasi anarkis dengan membakar kantor pemerintahan atau kantor polisi dan korban jiwa tidak terelakkan dalam perseteruan pilkada langsung itu. Pilkada langsung belakangan hanya menimbulkan dampak kerusuhan.
- Dampak konflik fisik horizontal dan vertikal dengan pihak keamanan sejauh ini mengakibatkan 70 orang tewas dalam sejumlah aksi unjuk rasa dan kerusuhan usai pilkada langsung sejak 2005. Sejumlah tokoh masyarakat asal Papua menyatakan dukungan terhadap pemilihan kepala daerah tidak langsung. Mereka meminta pemilihan oleh DPRD bisa dimasukkan ke dalam revisi Undang Undang Otsus Papua yang kini tengah dibahas DPR RI. Para tokoh yang tergabung dalam Tim Perancang Undang Undang Pemerintahan Otonomi Khusus Papua ini mendatangi kantor Fraksi Partai Golkar di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (9/9) untuk menyampaikan aspirasi tersebut. “Kita ingin sistem pilkada tidak langsung dimasukkan dalam RUU Otsus. Pertimbangannya situasi di Papua kalau pilkada langsung terlalu banyak konflik sampai-sampai merusak tatanan adat dan keluarga di Papua,” kata Ketua Tim, Basir Rohrohmana usai pertemuan. Pilkada langsung di Papua lebih banyak mudharatnya. Pasalnya, bukan cuma menelan biaya besar tapi juga memakan korban jiwa. Di Papua banyak yang mati karena Pilkada langsung. Kemudian rentan dengan perang suku. Mekanisme pilkada tidak langsung merupakan aspirasi mayoritas masyarakat Papua. Beberapa waktu lalu DPRD Papua menggelar rapat dengar pendapat dengan masyarakat untuk membahas revisi UU Otsus. Hasilnya, sebagian besar setuju pilkada tidak langsung harus masuk dalam revisi tersebut.
- Dampak besar pemilihan kepala daerah secara langsung yang membuat banyak pihak prihatin adalah maraknya politik uang. Penggunaan uang yang semakin marak dari waktu ke waktu untuk membeli suara konstituen, tidak adanya jaminan pasangan calon terbaik akan menang dan akibat biaya kampanye yang besar maka hasil pilkada sulit dipisahkan dari perilaku koruptif kepala daerah terpilih. menurut kajian pemerintah sebagian besar pilkada langsung berdampak pada pelaksanaan pemerintahan di daerah.
- Dampak penyelenggaraan pilkada langsung yang biayanya cenderung tinggi, menurut kajian pemerintah, antara lain menyebabkan banyak kepala daerah terpilih tersangkut

kasus hukum, khususnya karena korupsi untuk mengembalikan modal mereka saat kampanye.

- Kadang-kadang politik uang yang terjadi, ongkos politik yang mahal, kemudian tidak mudahnya membedakan antara popularitas dan kapasitas, dan seterusnya
- Selain itu juga muncul konflik horisontal akibat persaingan antar-calon. Mengakibatkan kontak fisik dan piskis antar pendukung para calon yang kadang mengakibatkan tindakan kriminal dan pelanggaran hukum
- Dampak besar pilkada langsung itu secara kumulatif akan secara otomatis mematikan ekspektasi publik akan hadirnya pemerintahan yang baik di Indonesia. Harapan untuk membangun demokrasi dan percepatan kesejahteraan rakyat telah didistorsi oleh sistem pilkada langsung.
- Sebagian besar pilkada langsung berdampak pada pelaksanaan pemerintahan di daerah.
- Dampak penyelenggaraan pilkada langsung yang biayanya cenderung tinggi, menurut kajian pemerintah, antara lain menyebabkan banyak kepala daerah terpilih tersangkut kasus hukum, khususnya karena korupsi untuk mengembalikan modal mereka saat kampanye.
- Dampak besarnya biaya kampanye yang kemudian mengakibatkan kepala daerah sulit lepas dari perilaku koruptif tergambar jelas dalam data terakhir yang dilansir Kementerian Dalam Negeri, bahwa ada 160 kepala daerah yang telah dan akan dibawa ke pengadilan karena korupsi APBD.

Dampak Positif

- Pilkada langsung membuat masyarakat daerah mengenal calon kepala daerahnya. Konstituen akan lebih dekat mengenal calon. Kemudian siapapun yang terpilih berarti mendapatkan mandat dari rakyat yang dipimpinnya

Penanganan

- Hal tersebut bukan berarti menafikan manfaat dari pilkada langsung, dampak negatif negatif itu dapat diatasi.
- Mungkinantisipasi dan penanganan dampak buruk tersebut, tidak perlu mengubah pemilihan langsung dengan pemilihan tidak langsung. Tetapi kita harus mengatasi

ekses, mencegah semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan komplikasi dan masalah-masalah baru yang tidak perlu terjadi.

Dasar hukum tentang Pilkada langsung sebenarnya tidak diwajibkan dalam UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak mengatur kepala daerah dipilih secara langsung, hanya dipilih secara demokratis. Melihat untung ruginya bagi bangsa dan masyarakat maka perlu dipikirkan kembali apakah tepat jika pilkada dilakukan secara langsung. Karena UUD 1945 menyebutkan hanya pemilihan presiden saja yang diselenggarakan secara langsung.

Adapun dampak negatif dan positif dari pelaksanaan pilkada tidak langsung yaitu :

Dampak negatif menurut Malik, ada beberapa dampak terburuk yang akan terjadi jika pilkada dilakukan secara tidak langsung atau dilakukan pihak DPRD yaitu :

1. Sistem ini akan memunculkan kekuasaan oligarki yaitu kekuasaan politiknya dikendalikan oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat.
2. Rakyat dipastikan tidak mengenal dan mengerti tentang kepala daerah yang akan memimpinya.
3. Mekanisme pilkada di DPRD menumbuhkan praktik politik uang yang lebih besar dan sistematis. Sebab, si calon kepala daerah tidak perlu lagi bersusah payah menemui, berkampanye dan meneriakkan harapan atau janji-janjinya kepada rakyat. Mereka cukup memberikan harapan kepada DPRD. Bahkan, itu tidak perlu, karena cukup dengan uang.
4. Tidak semua pilkada secara langsung yang telah diselenggarakan menimbulkan kerusuhan.

Menurutnya, adalah tidak benar alasan perlunya pilkada melalui pemilihan di DPRD. Sepengetahuan Malik, tidak ada proses pilkada secara langsung yang telah diselenggarakan sebelumnya terjadi hingga saling bunuh antar-pendukung. "Kalau alasannya rusuh, dari 34 pilkada gubernur dan 500-an pilkada kabupaten/kota, pilkadanya yang rusuh tidak sampai 10 persen kok. Seperti Palembang. Itu pun rusuhnya karena polisi lelet. Selain itu, nggak ada lagi kan.

Dampak Positif dari pilkada tak langsung :

1. Semua partai politik memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan konsolidasi dan kaderisasi partai secara baik sehingga memunculkan figur-figur politik baik sebagai pekerja, kader, aktivis dan simpatisan maupun di luar partai yang

bersangkutan sehingga benar-benar memunculkan figur politik yang dapat memenuhi aspirasi masyarakat sekaligus sesuai dengan visi, misi dan platform partai yang mengusung atau mendukung figur politik yang bersangkutan untuk menjadi kepala daerah.

2. Kepala daerah yang dipilih dengan sistem ini sudah dipastikan akan mendapatkan dukungan kursi di DPRD legislatif secara mayoritas sehingga akan meningkatkan kelancaran kinerja kepala daerah tersebut dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan membangun dengan dukungan partai politik yang solid dan kuat.
3. Institusi, lembaga dan perorangan yang profesional di bidang manajemen kampanye dan politik serta para poolster dan surveyor serta kelompok profesional lain akan tumbuh ke arah yang lebih berkualitas karena tidak lagi berkuat pada soal popularitas dan elektabilitas figur politik dalam bentuk pencitraan politik semata, tetapi akan lebih mendalam pada soal-soal yang menguatkan kapasitas, kapabilitas dan integritas figur politik sebagai kandidat kepala daerah.
4. Masyarakat pemilih (voters) memiliki proses pembelajaran yang positif agar benar-benar menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab ketika memilih anggota legislatif (DPRD) yang tidak sekedar figur-figur yang muncul dan jadi karena memiliki kekuasaan ekonomi dan politik semata, tetapi adalah memilih figur-figur yang benar-benar memiliki integritas dan kepribadian dan karakter yang dapat dipercaya, berkomitmen, bertanggung jawab, memiliki kejujuran, kebenaran dan kesetiaan baik kepada masyarakat maupun partai politik yang mendukungnya.
5. Seluruh proses dan sistem politik semacam ini akan mempercepat demokrasi Indonesia menuju pada demokrasi yang substansial kontraktual bukan demokrasi prosedural transaksional, karena kontrak-kontrak politik para figur politik akan semakin mudah dikontrol dan diawasi. Sehingga kita meyakini di masa depan akan muncul figur-figur politik yang benar-benar siap menang bukan sekedar siap menang tetapi siap menang dengan seperangkat kapasitas untuk mengelola dan melaksanakan kemenangannya itu untuk bekerja sepenuhnya melayani kepentingan rakyat.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa masing- masing cara mempunyai dampak negatif dan positif yang berpengaruh dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun kita harus memahami bahwa sistem demokrasi dengan tata apapun hanya sebagai alat atau kendaraan. Secara lebih filosofis kita akan mengatakan bahwa aturan hukum, kontrak politik, dan kesepakatan yang kita sepakati akan memiliki makna dan arti yang berdaya guna bila semua di dasarkan pada itikad yang baik sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 agar Indonesia menjadi negara yang sejahtera, makmur,dan damai walaupun didalam keanekaragaman. Karena sesungguhnya kemajuan dan kemunduran demokrasi di suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan rakyatnya.

Saran

1. Demokrasi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat,hal ini harus menjadikan pedoman para elit politik dalam mengemban amanat rakyat agar tidak hanya mementingkan golongan atau partai saja.
2. Masyarakat harus bisa selektif dalam memilih wakilnya kelak agar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
3. Saat pesta demokrasi masyarakat diharapkan tidak mudah tersulut emosi karena hal itu memicu konflik anatar kelompok,sehingga tujuan dari demokrasi itu sendiri gagal.
4. Pemerintah demokrasi harus bisa benar- benar mendengarkan suara rakyat.
5. Bentuk pemilihan apapun dapat berlangsung jika masyarakat dan pemerintah bersatu dalam satu tujuan yaitu membangun bangsa ini menjadi bangsa maju yang dapat mensejahterahkan rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

<http://nasional.kompas.com/read/2011/08/24/14261156/Tiga.Dampak.Negatif.Pilkada.Langsung>.
http://www.undip.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2571:pilkada-langsung-tidak-menciptakan-kesejahteraan-rakyat-&catid=78
<http://suamerdeka.com/harian/0505/13/opi03.htm>